

SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GOLO MORI KECAMATAN
KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

***ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF VILLAGE CONSULTATIVE
BODIES IN DEVELOPMENT IN GOLO MORI VILLAGE KOMODO
DISTRICT WEST MANGGARAI REGENCY***



OLEH :

MUHAMAD TAYEB
217110135

**KOSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GOLO MORI KECEMATAN
KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Oleh:

MUHAMAD TAYEB

NIM.217110135

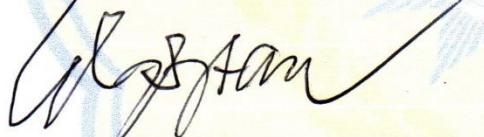
Untuk Memenuhi Ujian Sidang Skripsi

Pada Tanggal 12 Agustus 2021

Menyetujui,

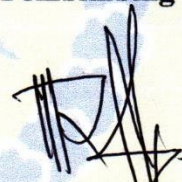
Pembimbing

Pembimbing I



(Drs. H. Mustamin H. Idris, MS)
NIDN.0031126484

Pembimbing II



(M. Taufik Rachman, SH., MH)
NIDN.0825078701

Mengetahui,

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Rahmat Hidayat, S.AP., M.AP)
NIDN.0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS TENTANG KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GOLO MORI KECEMATAN
KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

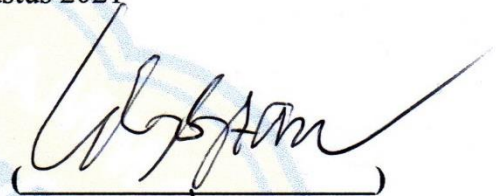
MUHAMAD TAYEB

NIM. 217110135

Telah dipertahankan didepan penguji
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021

Tim Penguji

1. **Drs. H. Mustamin H. Idris, MS**
NIDN. 0031126484



Ketua

2. **M. Taufik Rachman, SH, MH**
NIDN. 08225078701



Anggota

3. **Amin Saleh S.Sos., M.I.,Kom**
NIDN. 0831128310



Anggota


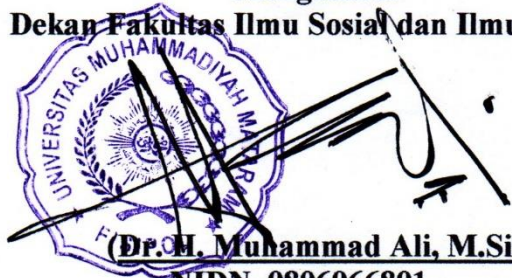
Ketua Program Ilmu Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S. AP., M.AP
NIDN. 0822048901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun diperguruan tinggi.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Puskta.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Mataram, 12 Agustus 2021
Saya membuat pernyataan



Muhammad Tayeb
217110135



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Tayeb
NIM : 217110135
Tempat/Tgl Lahir : Soknas, 22 Maret 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : FisiPol
No. Hp/Email : 085338909019 / tayeb220399@gmail.com
Judul Penelitian : -

Analisis Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Pembangunan di Desa Golo Mori Kecamatan Komato Kabupaten Manggarai
Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07, September 2021

Penulis



Muhamad Tayeb
NIM. 217110135

Mengetahui,
Kepala UPT Perustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Tayeb
NIM : 217110135
Tempat/Tgl Lahir : Soknar, 22 Maret 1999
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085358904019 / tayeb220399@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Analisis Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pembangunan di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten
Manggarai Barat

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 07 September 2021

Penulis



Muhamad Tayeb
NIM.217110135

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Hari ini kamu Kerja keras, berjuang dan berdo'a

Hari esok kamu sukses dengan memetik hasil



PERSEMBAHAN

Segala puji milik Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat hidayat, serta kasih sayang atas semua yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini dan Allhamdulillah skripsi ini selesai tepat waktunya. Selain itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung saya yaitu:

1. Untuk kedua orang tua tercinta yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, semangat, doa, serta pengorbanan hingga sampai saat ini.
2. Untuk diri sendiri yang selalu bekerja keras, perjuangan, dan semangat yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
3. Untuk orang-orang yang baik, keluarga, teman serta kerabat dekat yang selalu mendukung dan meberikan motivasi sehingga sampai saat ini saya bisa menyelesaikan skripsi saya tepat waktu, semoga kita semua sukses kedepannya.Amin
4. Untuk semua Dosen Program Study Administrasi Publik Khususnya Pembimbing, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingannya selama ini.
5. Untuk Almamater kampus Hijau UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Analisis Tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembagunan di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.”** Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman islamiyah seperti yang sekarang ini.

Proposal ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Strata satu (S1). Di prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karna itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani. M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.SI selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Rahmat Hidayat, S. AP, M. AP selaku ketua Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H. Mustamin H. Idris, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak M Taufik Rachman SH. MH sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan serta berbagai saran dan kritikan sehingga skripsi ini berjalan lancar.
6. Kepada kedua Orang Tua yang selalu memberikan Doa dan Motivasi serta Dukungan bagi peneliti sehingga peneliti selalu semangat dalam menyusun dan menyelesaikan proposal ini dengan baik.
7. Kepada teman dekat saya Supriyadin dan Fatahuroji yang selalu mendampingi, menemani dan memberi semangat kepada peneliti dalam menyusun proposal ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa program Studi Administrasi Publik dan semua pihak yang telah memberikan dorongan serta motivasi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah tulus dan ikhlas memberi Doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang telah disusun dalam proposal ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang membangun dalam penulisan proposal ini, agar bisa bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

Mataram, 12 Agustus 2021

Penulis,

Muhamad Tayeb
217110135

ANALISIS TENTANG KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA GOLO MORI KECEMATAN KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Muhamad Tayeb, M Taufik Ranchman, SH. MH, Drs. Mustamin H. Idris, MS

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja BPD Desa Golo Mori dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra Desa. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket, wawancara, dokumtasi dan observasi. Hasil penelitian yang ditemukan, bahwa kinerja BPD Desa Golo Mori yang merupakan fungsinya meliputi membahas dan menyepakati rancangan PERDES, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa sudah dilakukan dengan sangat efektif (85,00 %).

Sedangkan kinerja BPD yang terkait dalam pelaksanaan tugas untuk menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelolah aspirasi, menyalurkan aspirasi, serta menyelenggarakan musyawarah Desa sudah di laksanakan dengan baik. Adapun yang menjadi hambatan BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (kinerja) antara lain pemahaman anggota BPD yang masih minim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ruang kerja yang belum memadai, komunikasi yang terbatas, serta pemahaman anggota BPD dalam menggunakan IT masih kurang, sehingga untuk memecahkan masalah tersebut, perlu Pemerintah Daerah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada anggota BPD untuk memahami fungsi dan tugasnya serta menguasai teknologi informasi.

Kata kunci: *Kinerja, BPD, Pembangunan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
SURAT KETERANGAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kinerja.....	8
B. Pengertian Ruang Lingkup Good Governance	11
C. Pengertian dan Ruang Lingkup BPD	14
D. Pembangunan Desa.....	18
E. Kerangka Berfikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Teknik Penelitian dan Responden.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Desa Lokasi Penelitian	29
1. Gambaran Umum Desa Golo Mori	29
2. Latar Belakang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Golo Mori	31
3. Struktur Organisasi.....	33
4. Sarana dan Prasarana.....	34
B. Analisis Tentang Kinerja BPD Desa Golo Mori.....	35
1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Golo Mori.....	35
2. Pelaksanaan Tugas BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa .	36
3. Faktor pendukung Kinerja BPD Desa Golo Mori.....	47
4. Faktor Penghambat Kinerja BPD Desa Golo Mori.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Keadaan Mata Pencarian Desa Golo Mori	30
2.	Tingkat pendidikan di Desa Golo Mori	31
3.	Efektivitas kinerja BPD dalam membahas dan merancang peraturan Desa menurut responden	41
4.	Efektivitas kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat menurut responden	44
5.	Efektivitas kinerja BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa menurut responden	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep yang dapat dibangun dalam pelaksanaan roda pemerintahan dilihat dari dua aspek yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasinya. Kinerja pegawai adalah suatu kinerja yang bisa mengukur tingkat keberhasilan instansi tersebut, kualitas dan skill yang dimiliki oleh setiap karyawan mampu memberikan nilai-nilai positif bagi tingkat keberhasilan organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah merupakan indikator penting bagi pencapaian dan cerminan organisasi serta hasil yang dicapai oleh organisasi, kinerja juga dikatakan hasil (*output*) pada komponen-komponen yang dibangun oleh suatu organisasi. Kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi, bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerja sama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, menurut Yermias T. Keban dalam Puryanti (2014 : 1-2).

Dalam hal ini Desa Golo Mori merupakan desa yang mempunyai aset yang besar untuk bersaing dengan desa-desa lain, dari letak wilayah, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan salah satu daerah wisata, tidak terlepas dari itu penempatan pemerintah desa mampu mengelolah dari berbagai aset yang bisa menjadi daerah yang maju. Hal yang mendasar dikaji adalah kenapa sampai saat ini tidak ada perubahan yang eksternal terhadap kemajuan Desa Golo Mori, peran pemerintah desa dan BPD seharusnya

mampu memanimalisir semua program-program yang siap dijalankan dalam membawa perubahan ke arah pemerintah yang lebih baik(*Good Government*).

Adapun problem dalam segi pembangunan dan strategi Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dalam menciptakan perubahan yaitu sebagai berikut:

1. Perdes yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlalu banyak dan rumit dalam pelaksanaannya.
2. Kurangnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap kinerja Pemerintah Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa masih belum memahami secara penuh tentang peran dan tupoksinya dalam menjalankan roda pemerintahan Desa.
4. Tidak membangun Jalur kordinasi dan komunikasi yang baik terhadap Pemerintah Desa.
5. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat tidak di tampung dan disalurkan ke pemerintah Desa.

Berdasarkan point-point di atas dapat di simpulkan bahwa keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kinerja pembangunan Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat masih belum maksimal, sehingga efektifitasnya dalam pembangunan Desa dapat menurunkan kestabilan program pencapaian visi misi yang sudah dirancang oleh pemerintahDesa Golo Mori itu sendiri.

Berdasarkan PERDA Manggarai Barat No 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 3 menjelaskan tujuan pembentukan BPD yaitu sebagai berikut :

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan keberhasilan Desa, dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa perlu dikontrol dan diawasi juga oleh Camat sebagai pemerintah daerah dalam mengakomodir segala bentuk yang dilakukan di setiap desa yang ada, apapun bentuk kinerja dan penyusunan anggaran desa oleh BPD, Perlu melibatkan camat sebagai jalur koordinasi dalam berkomunikasi dan menjalankan fungsinya masing-masing.

Kinerja Instansi atau sering disebut kerja organisasi selalu terfokus pada pencapaian tingkat keberhasilan yang dijalankan melalui program-program yang dibangun dan dirancang sedemikian rupa melalui visi misi yang di persiapkan demi tujuan organisasi kedepannya. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan

tugas pembantuan. dalam hal ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menentukan perda, yang diharapkan dalam mendukung program-program pemerintah daerah.

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Fungsi kebijakan di sini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan sosial yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PNRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

Dengan demikian, kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu. Pencapaian hasil dapat dinilai menurut pelaku, yaitu yang dihasilkan oleh individu (kinerja individu),

oleh kelompok (kinerja kelompok), dan oleh institusi (kinerja institusi). Kinerja individu menggambarkan sampai seberapa jauh seseorang telah melaksanakan tugas. Desa adalah suatu pewujudan geografis yang ditimbulkan unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah- daerah lain. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD ini adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pemilihannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD

merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

B. Rumus Masalah

Adapun rumus masalah yang saya angkat dari penjelasan yang terdapat dilatar belakang yaitu :

1. Bagaimana Kinerja BPD dalam mendukung kelancaran pembangunan Desa?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD dalam Pembangunan Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumus masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja BPD dalam mendukung kelancaran pembangunan desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kinerja BPD dalam Pembangunan Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam melakukan penelitian terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan untuk memperbaiki kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa.

3. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mampu menganalisis lingkungan masyarakat serta penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Srata Satu (S1). Pada Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik, Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi (Yeremias T. Keban 2004:191).

Yeremias T. Keban (2004:192) mengartikan kinerja sebagai *the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period*. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang *outcome* atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidak termasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.

Sedangkan Suyadi Prawirosentono (1999:2) mendefinisikan kinerja sebagai *performance*, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja dapat dilihat dari hasil yang diperoleh melalui kerja keras dan mampu

menyimbangi konsep dalam pelaksanaan kinerja, sehingga tujuan dan diinginkan dapat diperoleh dan terlaksana dengan baik sesuai prosedur yang diterapkan. Dengan memperhatikan kendala dan aspek-aspek yang dapat menghambat proses pelaksanaan kinerja.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dalam Yeremias T. Keban (2004:203) untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut:

- a. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut.
- b. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam

manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem penilaian kinerja.

- c. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
- d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen yang tinggi terhadap efektivitas penilaian kinerja, maka para penilai yang ada dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.

Kesimpulan dapat ditarik bahwa dalam pelaksanaan kinerja harus memiliki komitmen dan konsisten terhadap tanggung jawab yang diembankan, demi kelangsungan serta mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi, setiap organisasi akan memiliki tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai karakteristik yang dihadapi.

B. Pengertian Ruang Lingkup Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *Publik Good and Service* disebut *Governance* (Pemerintah), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*Good Governance* (Kepemerintahan yang baik). Dalam menjalankannya membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat Sedarmayanti (2013:2).

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Semangat reformasi telah mewarnai penyalagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan, dengan

memperaktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberi perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan *Publik Goods and Services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Sedarmayanti (2004:7) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas: Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- b. Transparansi: Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan: Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

d. Aturan Hukum: Pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup BPD

1. Pengertian BPD

Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat. hal ini sejalan dengan ungkapan Soekanto (2004:219).

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, lahirlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif pada tataran pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Wijaya 2006, 35).

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa

Pemaparandi atas dapat disimpulkan bahwa teori peran merupakan teori yang membahas tentang posisi serta perilaku seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan aktor lain. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu terlihat mempunyai dihadapan aktor lain agar tidak menyimpang dari sistem atau harapan yang ada dalam masyarakat. Biddle dan Thomas dalam Nugraha (2020:17)

Membagi istilah dalam teori peran menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Aktor yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan aktor dalam perilaku
- d. Kaitan antara aktor dan perilaku

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif terhadap kinerja dan peran Badan permusyawaratan Desa dalam mendorong good governance. BPD merupakan lembaga legislative dalam struktur pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, BPD termasuk salah satu unsur yang diharapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. BPD menjadi mitra

kerja pemerintah desa dan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa.

3. Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Fungsi BPD

Berdasarkan Perda Manggarai Barat No 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa tertera pada pasal 32 menjelaskan fungsi BPD sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2) Tugas Dasar BPD

Terdapat pada pasal 33 pada Perda Manggarai Barat No 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan Tugas-tugas BPD seperti dibawah ini:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antara waktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai masalah yang terdapat pada penelitian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya penelitian terdahulu sebagai bentuk penguatan

landasan-landasan masalah yang terdapat pada judul penelitian yang diambil oleh peneliti. Serta mengungkapkan fenomena yang terdapat dalam rumus masalah melalui sudut pandang yang berbeda. Sehingga yang diharapkan dapat tercapai dan menambah ilmu pengetahuan yang luas bagi parah peneliti dan pembaca. Adapun penelitian terdahulu yang relevan yang menjadi acuan sebagai berikut:

a. Roza (2017)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa” metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif/kualitatif. Hasil penelitian ini lebih menegaskan BPD dalam pengontrol dana-dana desa dalam pengelolaannya pengawasan keuangan perlu ditingkatkan dalam menunjang keberlangsungan masyarakat sejahtera.

b. Hartati (2010)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Ungar Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini lebih mendapatkan banyak faktor yang terdapat pada lapangan dari berbagai sektor dalam desa tersebut semua di rampung melalui tabel yang terdapat pada pembahasannya, memperkuat legitimasi, adat istiadat, pengawasan serta hubungan komunikasi.

Penelitian ini mampu memaparkan semua aspek-aspek yang terdapat pada objek yang diteliti sehingga titik permasalahannya cepat diidentifikasi, letak persamaannya lebih ke dalam menjelaskan fungsi BPD dalam menjalankan tugasnya.

D. Pembangunan Desa

1. Defenisi Pembangunan

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” yang artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan perhatian pada “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
- b. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian dalam Run (2018:3) Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara Bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Tjokroamidjodalam Listyaningsih (2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

2. Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dilain pihak bahwa pembangunan desa atau kelurahan diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yaitu berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok yang kedua. Dalam pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong

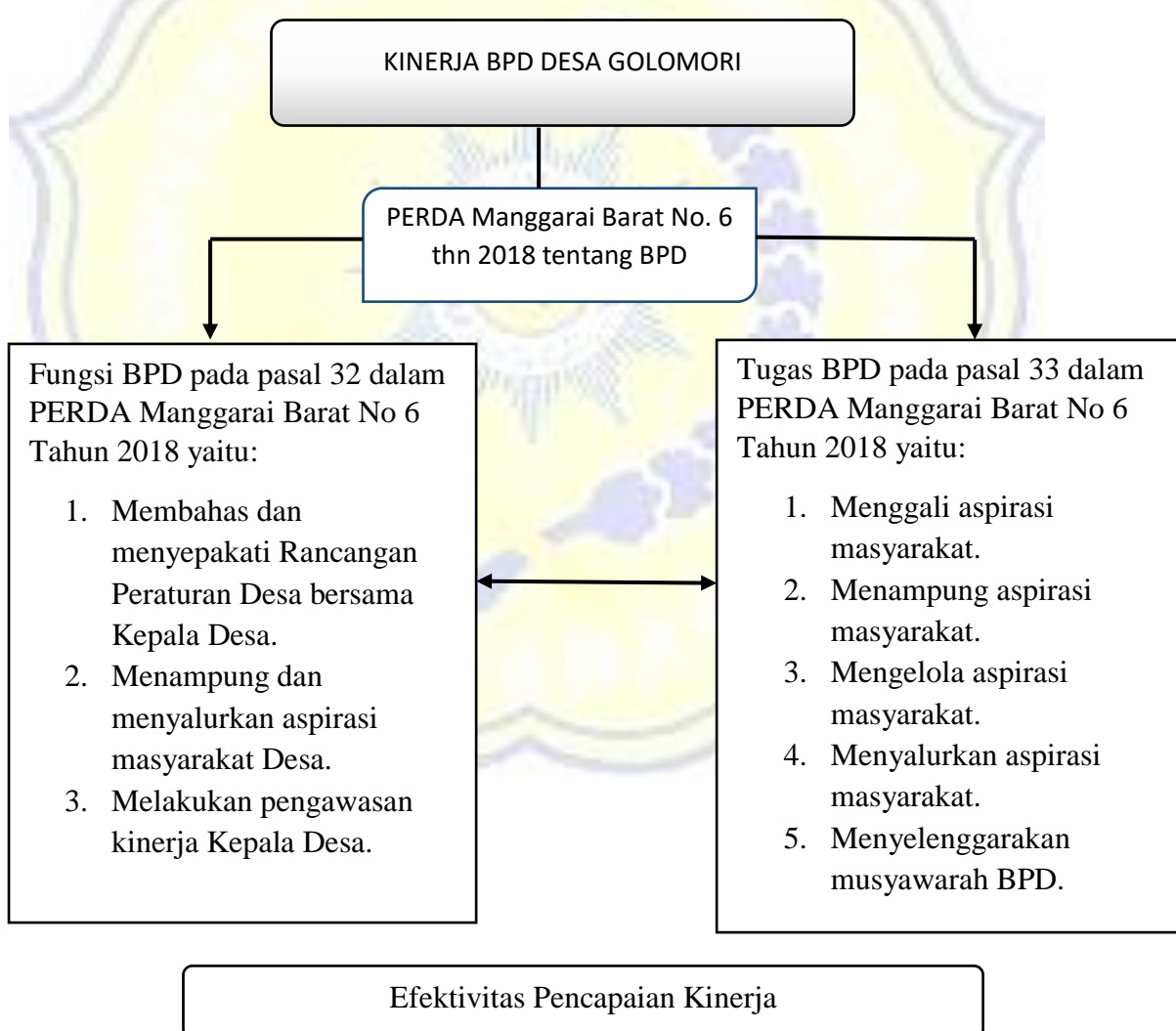
royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, (Sembel 2016:2).

Menurut Conyers dalam Sembel (2016:3) Partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan.

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
- c. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan suatu konsep bagan dalam penerapan semua aspek yang dilakukan pada proses tata kelola menjalankan roda organisasi, Hal ini peneliti mencoba menggambarkan kerangka berpikir yang akan coba diterapkan dalam birokrasi pemerintah Desa Golo Mori sebagai desa yang akan nantinya peneliti terjun untuk melakukan penelitian pada objek yang sudah ditentukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber dari objek yang terdapat pada keadaan Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat .Menurut Maykut dan Morehouse dalam Wowor (2015:6). Metode penelitian kualitatif adalah sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarangberdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagai mana adanya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dilapangan. Selain itu juga landasan teori ini bermanfaat untuk memberi gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Adapun menurut Soekanto (1982:32)yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan,dan perilaku nyata.yang diteliti dan dipelajari oleh objek penelitian yang utuh, maka dengan menggunakan metode

kualitatif seorang peneliti diharapkan dapat mengerti dan dipahami gejala yang ditelitinya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan mengamati objek dan penentuan informan, dari permasalahan yang terdapat dalam desa tersebut, hal ini yang menjadi dasar dalam penentuan keberhasilan penelitian dalam membaca dan memahami aspek-aspek yang diangkat dalam penentuan suatu masalah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu objek yang akan diteliti oleh peneliti, dalam menggali dan mengkaji masalah-masalah, lokasi penelitian ini tepatnya di Desa Golo Mori, Kecamatan. Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penelitian ini seorang peneliti sebagai instrument, yang secara langsung melibatkan diri dalam subjek penelitian sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu penelitian ini dilakukan selama dua bulan, dari bulan Januari sampai bulan Februari 2021.

C. Teknik Pemilihan informan dan Responden

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia memberikan informan kepada peneliti, sebagai individu yang sangat penting informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan penelitian, (Arikunto, 2010:188).

Adapun pengumpulan informen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Golo Mori

2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Golo Mori
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
4. Anggota masyarakat Desa Golo Mori, sebagai responden yang ditetapkan secara Propesional sampel.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu, sumber data utama yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi langsung pada lokasi yang diteliti yaitu di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, melakukan pengamatan, obsevasi, wawancara kepada informan dan responden dalam pengumpulan data.
2. Data sekunder yaitu, sumber data tambahan yang diperoleh peneliti dari dokumen, surat kabar, majala, koran, jurnal, skripsi, dan lain-lain sebagai data pendukung dalam penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Angket

Angket adalah daftar pertanyaan yang dibuat oleh peneliti untuk responden yang nantinya akan menjadi data primer bagi peneliti dalam mengukur tingkat kepuasan terhadap tempat penelitian.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat. Dalam mengumpulkan data menggunakan

observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya.

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, (2017:203) menyatakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang untuk menghimpun kesatuan, suatu proses yang tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis, di antaranya berupa proses-proses pengamatan dan ingatan.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti sebelumnya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

Menurut Moleong (2016: 186) wawancara adalah perihal bercakap-cakap dengan maksud tertentu dengan adanya hal yang ditulis. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan. Pewawancara yang akan mempersiapkan suatu wawancara, perlu membuat beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan, urutan pertanyaan, seberapa penting pertanyaan itu, waktu wawancara, dan bagaimana merumuskan pertanyaan (Moleong, 2016: 192).

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil subjek yang akan diteliti pada Desa Golo Mori dengan cara merekam suara, video, pengambilan gambar dengan menggunakan media modern seperti HP dan camera yang akan menjadi referensi tambahan pada penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pada desa tersebut.

Dokumen merupakan catatan suatu kejadian yang sudah lalu (Sugiyono, 2017: 329). Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life stories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen lama dapat digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 2016: 217).

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:7) Teknik analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai suatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun analisis, yaitu reduksi data, penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan, tiga komponen analisis yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka

data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.